

RANCANGAN RENJA TAHUN 2025



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya,

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 dapat tersusun dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Kota Banda Aceh Tahun 2025 tidak terlepas

melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang tersusun dengan memedomani Peraturan

WaliKota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota

Banda Aceh Tahun 2023-2026. Secara Substansi, dokumen Renja Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu (n-

2), tujuan dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan

dan dukungan dalam penyusunan Rancangan Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tehun 2025. Semoga Allah SWT senantiasa

meridhai kita semua.

Banda Aceh, 1 April 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Andri, S.STP,. M,Si

Pembina / NIP. 19840323 200212 1 002

i

# **DAFTAR ISI**

KATA	PENGANTAR	i
DAFTA	NR ISI	ii
EXECL	ITIVE SUMMARY	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	2
1.3.	Maksud Dan Tujuan	4
1.4.	Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Pera	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra angkat Daerah	
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
BAB II	I TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	20
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	20
3.3.	Program dan Kegiatan	21
BAB I\	/ RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
BAB. V	/ PENUTUP	35

#### **EXECUTIVE SUMMARY**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Kota Banda Aceh yang akan dijabarkan pula dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Berdasarkan RENSTRA DPMPTSP terdapat 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan yang direncanakan termuat dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025. Adapun Program dan Kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian target kinerja yakni jumlah nilai Investasi Kota Banda Aceh sebesar Rp. 630,06 Triliun, pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 90,76.

Rencana anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.013.580.546,-, yang terbagi kedalam 6 program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, dan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan sesuai dengan amanat Undang — undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman kepoda Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang didalamnya memuat kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan tentang Langkah — Langkah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam kedudukannya Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu sebagi salah satu produk perencanaan daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah strategi jangka menengah dengan perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh selaku Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Dalam menyusun Rencana Kerja harus memperhatikan kesesuaian capaian output antar kegiatan dalam satu program maupun dengan prorgam lain, selain itu harus ada keselarasan program dengan isu strategis daerah yang memuat dalam rancangan awal RKPD Kota Banda Aceh.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu tahun 2025 mengacu pada dokumen — dokumen perencanaan yang sudah ada yaitun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023 — 2026 dan Renstra DPMPTSP tahun 2023 — 2026 dan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yaitu Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan intervensi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Kota Banda Aceh yang dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025.

#### 1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Nasional;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
- 11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
- 18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor KEP/24/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yaitu Tetang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan intervensi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

- 20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- 21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- 22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Thaun 2016 nomor 2);
- 23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023 2026;
- 24. Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
- 25. Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
- 26. Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;
- 27. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

#### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah sebagai acuan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mengoperasionalisasikan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai VISI MISI Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 menyediakan informasi mengenai rencana kerja tahun 2025 serta sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program Pembangunan urusan Penanaman Modal untuk kurun waktu satu tahun secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh (RPD) tahun 2023 – 2026 sebagai arah dan pedoman untuk menjabarkan perencanaan pembangunan pada

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Banda Aceh selama satu tahun anggaran yaitu tahun 2025 yang dituangkan dalam program dan kegiatan OPD.

Sementara, tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah sebagai bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan OPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banda Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dimana tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah "Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Kondusif Melalui Kebijakan Penanaman Modal".

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh tahun 2025. Adapun pencapaiannya dapat dilihat pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang targetnya telah ditetapkan didalam Renstra.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2024 disusun menurut sistimatika sebagai berikut :

#### Sistematika Penulisan:

#### BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

# BAB II Hasil Evaluasi Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

# BAB III Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Banda Aceh

- 3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

# BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Kota Banda Aceh

4.1 Tabel Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran

# BAB V Penutup

# BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

# 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, melaksanakan Evaluasi pelaksanaan Renja yang dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan. Kepala OPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila berdasarkan hasil evaluasi oleh Bappeda ditemukan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan, maka Kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja OPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra OPD, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah. Kemudian di fokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Banda Aceh tahun 2023 – 2026.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 Tanggal 3 November 2023, Maka Anggaran Pendapatan dan Belanja DPMPTSP Kota Banda Aceh dari sebelumnya sebesar Rp. 8.164.818.873,- menjadi Rp. 7.992.313.742,- yang di bagi kedalam 2 (dua) pembelanjaan, yaitu:

- 1) Belanja Operasi (Belanja Pegawai & Belanja Barang dan Jasa) Rp. 7.970.259.742,-
- 2) Belanja Modal (Belanja Modala Peralatan dan Mesin) Rp. 22.054.000,-Realisasi belanja pada tahun anggaran 2023 s/d desember realisasi anggaran sebesar Rp, 7.841.000.711,-

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

# 1. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah.

Realisasi Fisik: 78.17% dan Realisasi Keuangan: 98,12% dengan rincian sebagai berikut:

- 7.				Realisasi		Sisa (Rp)
No	Kegiatan	Jih Anggaran (Rp)	Fisik	Realisasi Keu	angan	Sisa (nh)
		()	%	Rp	%	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	4.840.935	69.01	3.340.935	69.01 -	1.500.000

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.955.136.552	100	4.874.079.319	98.36	81.057.233
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.795.797	100	129.624.715	97.61	3.171.082
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	22.054.000	100		-	22.054.000
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.720.283.043	100	1.716.580.312	99.78	3.702.731
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.372.300	100	97.431.000	83.72	18.941.300

# 2. Program Promosi Penanaman Modal.

Realisasi Fisik: 100% dan realisasi Keuangan: 100%, dengan rincian sebagai berikut:

				Realisasi		
No	Kegiatan	Jih Anggaran	Fisik	Realisasi Keua	ngan	Sisa (Rp)
		(Rp)	%	Rp	%	1
1.	Kegiatan	-12.303.000	100	-12.303000	100	-
	Penyelenggaraan					
	Promosi Penanaman					
	Modal Yang Menjadi		ļ	]		
	Kewenangan Daerah				!	
	Kabupaten/Kota					

# 3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Realisasi Fisik: 0 % dan realisasi Keuangan: 0 %, dengan rincian sebagai berikut:

				Realisasi		
Pe	Kegiatan	Jlh Anggaran	Fisik	Realisasi K	euangan	Sisa (Rp)
		(Rp)	%	Rp	%	
1.	Kegiatan Penetapan	-	00,00	_	00,00	-
	Pemberian					
	Fasilitasi/Insentif					

Dibidang Penanaman		
Modal Yang Menjadi		
Kewenangan Daerah		
Kabupaten/Kota		

# 4. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Realisasi Fisik: 30 % dan realisasi Keuangan: 29,88 %, dengan rincian sebagai berikut:

		III. Anggaran		Realisasi					
No	Kegiatan	Jih Anggaran	Fisik	Realisasi Ke	uangan	Sisa (Rp)			
		(Rp)	%	Rp	%				
1.	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan	17,436,115	30.00	5,210,130	29,88	12,225,985			

# 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Realisasi Fisik: 98.57% dan realisasi Keuangan: 97.41%, dengan rincian sebagai berikut:

		III. Augusta		Realisasi	<del>v</del>				
No	Kegiatan	Jih Anggaran	Fisik	Realisasi Keu	angan	Sisa (Rp)			
		(Rp)	%	Rp	%				
1.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.	333,900,000	98.57	325.239.300	97.41	8.660.700			

# 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Realisasi Fisik: 100% dan Realisasi Keuangan: 100 %, dengan rincian sebagai berikut:

				Realisasi	<u> </u>	
No	Kegiatan	Jih Anggaran	Fisik	Realisasi Keu	angan	Sisa (Rp)
		(Rp)	%	Rp	%	
1.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang	677.192.000	100	677.192.000	100	0

	Terintegrasi Pada Tingkat			
	Daerah Kabupaten/Kota			
1				

 Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut;

Terdapat 10 (Sepuluh) kegiatan pada 6 (enam) program yang belum memenuhi target Renja dan Renstra DPMPTSP, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah (69.01%)
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (98.36%)
  - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
     Daerah (0 %)
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
     (99.78%)
  - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
     Pemerintahan Daerah (83.72%)
- b. Porgram Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Dibidang Penanaman
     Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (0%)
- c. Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
  - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan (29.88%)
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
  - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi
     Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota (97.41%)
- 2) Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  - Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Pereizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Daerah (100%)
- 3) Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Tidak ada program dan kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan.

4) Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan;

Faktor penyebab belum tercapinya target pada beberapa program dikarenakan capaian tahun berjalan belum selesai, dan terjadinya pengalihan anggaran pada kegiatan yang lebih stategis.

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
  - Secara keseluruhan keterkaitan yang timbul dengan pencapaian target capaian program Renstra yang belum sesuai, peningkatan sarana dan prasarana serta SDM untuk mendukung pelayanan secara digitalisas, tidak mampunya secara terus menerus menggali potensi investasi daerah akibat keterbatasan sumber daya, sehingga tidak menemukan potensi ungulan investasi.
- 6) Kebijakan atau Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut;

Kebijakan atau Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang berdampak pada keterbatasan kegiatan.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evalusi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Banda Aceh

	-	1 Unit						Unit	<u>-</u>	Jumish unit kendersen dinas oprasional eteu Japangan yang disadiakan	Sub Kegistan Pangadean Kanderaan Dinas Oprasionel atau Lapangan	1.07 9002	2	#	
Unit	1	1 Unit			3 Unit	L'AIR	16	Unit	ä	Jumiah Sarana den Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lalanya yang disediakan	Sub Keglatan Pengadaan Sarena dan Presarane Gedung Kentor atau Bangunan Lainnya	2.07 10	p	<b>5</b>	N
Unit	5	50 Unit	-		SO Unit	וחט	70	Unit	55	n Jumlah Perakatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Sub Kegistan Pengedaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.07 06	2	16	2
*	198	100%		,	100%	*	ğ	*	5	Persentase pernamakan kebukuhan Barang Milik Daerah Penladang Unuses Pamerintah Deerah	Kegistan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unusan Permatrintah Daerah	2.07	2	1	N
Laporan	24	24 Laporan		44,441,246	24 Laporen	laporan	5	Laparan	16	Jumlah laporan Penyalanggaraen rapat koordinesi dan konsultasi SKPO	Sub Kegleten Penyelenggaran Repet Koordinasi dan Konsultesi SKPD	2.06 09	92	18	
Jents	15	16 Jenis		42,509,604	16 Dakumen	en is	8	pater	t	) Jumlah jenis Berang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Sub Kegisten Panyadiaan Barang Cetaken dan Penggandaan	2.06 05	9.	<u> </u>	~
Jenis.	ds	6Jen1s		0,000,8800,8	6 Dokumen	Jenis		paker	os.	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disadiakan	Sub Kegiatan Penyedisan Bahan Logistik Kentor	2.06 4	9	is	2
Je ni s	9	9 Jenis		5,175,853	9 Bulan	Jep Is		Pakes	Ħ		Sub Kagiatan Penyedisan Komponen Instalati Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.06 01	ន		N
*	58	150%		PR_0\$4,708	MOOT	×	ĕ	×	16	Pemantasa pemenuhan kebuahan peminjang edinindrasi umum	Kegleton Administrasi Umum Perenghet Daerah	3.52	8	=	N
Stell	٥	0.81%			O Stel	Ster	a	1912	o	Jumish Paksian dinas beserta perlengkapan nya yang disediakan	Sub Kegletan Pangadaan Pakalan Dinas besarts Atribut Kelengkapannya	2.05 02	9	#	N
*	190	100%			ХООХ	*	8	*	ğ	Persentasa perhanuhan Administrasi Kapagitwalan Perangkat Dameh	Kogirenn Administrasi Pagawalan Perangket Descah	2	2	Ľ	м
Bulan	12	12 8ulan		573,453,908	12 8000	bulen	E	Bulan	t	Jumlah waktu Jasa Tenega Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disadiakan	Sub Kegjatan Penyedisan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.02 02	92	ä	٨
Bulan	£	12 Bulan		3,454,909,772	12 8 vian	Bulan	ĸ	bulen	ä	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disadlakan	Sub Kegisten Penyadisen Gaji dan Tunjangan ASN	2.02 01	E	<b></b>	N.
¥	100	100%		4,128,363,680	100%	*	ğ	*	ğ	Fersentese perrenuhan administrasi keuengan	Kaplatan Administrasi Kasangan Perangket Deegh	Ę	2	5	
Dokumen	Ģ	9 Dokumen			9 Dakumen	Dokumen	va .	Dokumen	9	Jumiah dokumen perencansan yang disusun	Sub Kaglatan Penyusunan Dokumen Perancanan Perangkat Daerah	10 to	æ	18	
*	100	100%			3,00%	*	ğ	×	100	Perantse dolumen parencamas, penganggatad dan waisasi OPD yang tertasun	Kegistan Perencaman, Penganggaran, dan Kudusal Kinorja Perangkat Daarah	101	8	E	2
*	100	100%		5,501,410,725	yeout.	×	ĕ	×	100	Personiase pemeruhan kebubuhan perunjang perangkat daerah	Progreen Pyntoglang Unasan Permethotah Daerah Kab/Kota		\$	ž.	~
	1000年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の			fill									146		
(11) = (20/4)	(10) = (5+7+9)	(8)	(8) = (7/6)	(2)	(6)	(5)		( <u>4)</u>		(3)	(2)		<b>e</b>		T
Tingket Capalon Roellood Target Sunstra (%)	Realisasi Capalan Program, Kajistan dan Sub Kajistan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023 (n-1)	Target Program, Kegleten den Sub Kegleten Ranja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisesi (%)	Realisai Ranja Perangkat Tingkat Realisai (%) Daerah Tahun 2023 (n-2)	Target Ranja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Heasi Program & Kaluaran Kegiata, Sub Kegistan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target Kinerje Capalan Program (Benatra Perangkat Dearah) Tahun 2023-2026	Target Prog Perangka 2	indikator Kinerja Program (outcome) /Kaglatan (output)	thrusan/Bidang Urusan Pamerintahan Daerah dan Program/Kaglatan		R od		
ian Target Renstra /d Tahun 2024	Perkiraan Rasikasi Capalan Target Renatra Perangkat Deerah s/d Tahun 2024		ingletan den Sub 2)	Reelisasi Kinerja Program, Keglatan dan Sub Keglatan Tahun 2023 (n-2)	Target dan Reelis Kej										

					•	*		-	-	-			N	P	14		м		~		₽-	N	~	12	۳
*	=	£	<b>3</b>	ti	=	<b>5</b>	=	2	\$	2	8	¥	2	8	2	18 02	2	2	01	19	D1	92	12	<b>5</b>	2
ğ.	2 2 2	107 8	2.01	20	2	\$	200	20.0	10.0	-	102	102	202	2.03	2.01	2.01	- Z	-	2	2.09	1.09	5	2.08	2.08	# #0.k
9007	2004	1 000	3	2		1	8	£	-	$\dashv$	8	000	В		80	B			8	8	2		Ş.	೭	
Sub Kegisten Penjedisan den Penjelbiaan Kongaduan Lejennan Konsultasi Pelilanen Densaha Berbasia Nisiko	, Pementeuen sneilsti, evelüzel, den poleporen dibideng peristnen berusaha berbei is delko		Pengalokan sayanan Konsultasi dan Pengalokan Pengaduan Masyerakai terhadap pelayanan Terpadu Partiman dan Mon Pendinan	de menteuen pamenuhen komitmen Porizinan dan NonPerizinen Penenamen Model	Register) Palayaman Perisiman dan Non Perisiman separa Yepadu Satu Pirau di Bidang Perententah Mendel yang menjadi bewethangan Osemin Kalangatan/Kota	Program Pelayanan Penanamen Model	Panyusunan strakegi Promosi Panansman Model Kewenangan Kabupatan/Kote	Sub Kegistan Palskaansen Kegistan Promosi Panedamen Model (baereh Kebupaten/Kuth	Kagistan Panyelanggangan Promosi Assammen Aodai yang Menjedi Kesenengan Deersh Kabupateny Keda	Program Promost Penametrian Medal	Sub Registen Penyusunan Pete Potensi Investus i Kabupatan/Kata	Perrutthiren date potens investasi deersh peda sistem PIR (Potensi Investasi Regionel)	Sub Keeletan Penyusunan Rencana Umum Penenaman Model Daerah Kabupatan/Kota	Kaglatan Penhawitan Peta Potenti invertasi	Paelikasi Keminkan yang dilakukan cieh Pemedintan Kebupasan/kata		Kagintan Pankiapan Pambartan Fasikos/Invareti Dikdara Pankapan Accide yang Marjad Kawenangan Destuh Kabupatan/Kota	gan idim Peneraman Model	emailhers an/Rehabilitasi surana Gedung Kantor stau nya		Sub Kaglatan Penyedikan Jasa Pameliharaan, Siaya Pemeliharaan, Pajak dan Sarizinan Kendasaan Dinas Operasional atay Lapangan	Kagintan Pamaitharten Beinng Milit Desteh Pantarjang Urusen Pemanistah Desteh	Sub Keglatan Penyediaan Jasa Petayanan Umum Kantbr	Sub kegietan Penyedisan Jasa Komunikasi, J Sumber Daya Air dan tistrik	Kegletin Penyediaan Jesa Penunjang Unisan Penyedesiah Daersh
Jumish pataku usaha yang mempenpiah Isyana Kabasitasa perlainan berbasha mesalui sistem pentinan berbasha hako tarintegasi secare elektronik	Jumlah kegistan uraha yang mendapat primantulan enalisi), seribuasi dan pataponpi distelang priminan berusaha penalis ditko linus dalama ketusaha kebupaten/hora dagi kepitun usaha dari	Numlah pelaku waaha yeng middepatkan pelayanan pendicin besuaha melalul ilkem pendipan besuaha besasis dilka teriotegrasi secasa elaktronik	Juminen orang yang majappurotek hayanan komputekan dan terlaksa manya pengaduan majayarakat demadap balayanan terpadu saku pentelnan dan Non pertelnan	ounien kegisten usehe yang mendapat pemantauan komitmen Perisinan buruseha dan Non Pedisinan Penansanan Model	Juniah Palayaman Pedatran dan Kerjanfeiran Sasan Terpada assu Pintu Dibidang Peneraman Andala	Persentane Tingket Regulation Maryanther	Jumlah Dokuman a kategi Promosi Penanaman Modal Kati/Kote	Jumiah Dokumen hasil kegistan Promusi Repanaman Model	Jumieh Lapoten Penyekenggarhan Prempel Penungnan Model	Pesantasa Promosi Peraneman Model	Jumilah Dokuman Pata Potensi (nyestas) Kebupaten/Kota	jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutahhiran data potensi investasi	Jumiah Persturan Daerah (Perda) Rencana umum Penenumun Model Daerah Kabupaten/Kota	Jumileh Pemileustan Feta Polensi Pepunuman Medili	Juniah lesepakatan Komitraan artoe usaha besar (PMA/PMON) dengan UMMM di daerah.	Juniah Penerapan Kebijaken Deerah Mengeral Pemberian Pasiftas/Insentif dan Kemudahan Penerapan Moda	Jumiah Penetupun Pumberlan FusiMan/Nusentif Dibidang Pumpaman Model	Persentase Pengambengan Bilim Penaneman Model	jumijah sarana dan Prasarana Godung Kantor atau Bangunan Lalonya yang dipelihara/direbabilitasi	Aqmiah Peraistan dan Mesin Labonya yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional atau Ispangan yang dipolihaca dan dibayarkan pajak dan perisinannya	Personiase percentus kabusuban Persolbiarean Berang Milit Deseth Personjung Lindan Personiktahan Daseth	LIMENT REPORTS DESCRIBED SERVICES DESCRIPTIONS DESCRIPTIO	Jumish laporan penyediash jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Persertiase personalus Penyediaan Just Penunjang Uruman Perserintahan Desemb
8	8	2500	¥00	ı,		96	-	н	-	oot		-	-	100	g	٠	ğ	100	3	£	,	ğ	٦	ä	ğ
Pe (ext	Register Geaha	Polyhy Centra	orang	Xagistus Cabin	Liporin	*	Pokumen	Dokumen	Lapporari	*	Bakumen	Observa 7	Dakumen	*	Dokumen	Dokuman	£		Unit	unit	Unit	×	Laporão	Laporan	
,		,	8 9 6	ь		B			,	8			a			۵	a	•	2	E		8	E	ដ	8
,		,	Orang	Keglatan Caaha	Laporen			X48 B KB J	Laporate	*			a			o	•	ē	unit	2017	unit	*	B C   B C	buleo	×
,		•	1154 Orang	Keni stan cuanta	2 Leptoren	200%		register:	1 sporen	MOOT			Dokumen	100		1 Dokumen	10071	YOOK	32 Units	59 Unit	) Walk	100%	12 Bulan	12 Bulen	100%
•	•	•		5,210,130	±,210,130	9,210,100		12,303,000	12,508.000	11,500,000										24,313,000	17,005,630	61,818,000	200,453,312	1,312,180,000	1,512,685,512
	,		۰	0																					
5	*	2500			2 Laporan	94001	3 Dokumen	) Dakomen	\$ Laporen	*Modif			1 Bokumen	100%	50 Dokumen	1 Dokumen	NOOR	MOOT	32 Unix	\$9 Unit	/ Unit	TOOM.	the land	12 Bulen	Secur
Pelaku Usaha	大き倒し まかまご こまる ゴマ	Pelaku Usahe	o	0		200		12	-	901	-	1		8		1	ĬĐ.	15	23	99	,	100	i.	12	100
			0	0	Leparen	2		=	- Land		Dawanen	014709	Dokumen	*		Dokumen	*	*	Unit	0.11.	Colt	*		BUIL 23	*

wore: \*Warna Pink adsiah Sub Kegiatan pada Tahun 2024

	<u> </u>	<u>_</u>						<del></del>				_
	<b>#</b>	=	=	F	#	<b>5</b>	a				<b>=</b>	=
	8	- R	8	*	8	8	8.				8	8
	2.91	201	52		2.01	101	2.01 0004				Ě	
÷ 7	0002 2 2 4 3 5	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	222	33	SE 0004	9e Su		<u> </u>	- <del> </del>	Par Kor	K & K	Progra
Note:	Sub Kegistro Pengolahan, Penyajian dan Pemarhatan Data dan Informati Perdinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Pedinan Berusaha Terintegrati secara Elektronik	kegisan Pengolahan, Penyajian dan Pemarifasian Data dan informasi Perizinan Penan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Penan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kagistan Pengeidaan Data din Informsal Perturun dan Hon Pertinan yang Terintagrasi pada Tingkat Diseshi Kabapatan/Kota	Program Pengelolaan Data dan Skitam informasi Penanaman Model	Sub Kagjatan Pengawasan Penanaman Modal.	Sub kegistan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.	Sub Kegistan Penyelesalan Permesalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelalu Usaha dalam meresilsesikan Kegistan Usahanya.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanasan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelakseduan Peraneman Model	Kegistan Pengendalian Pelatsanuan Penareman Modal yang menjadi Kerentengan Deerzh Kabupstan/Koto	n Pengendalian Pelaksansan Penanaman
niah Sih Koolotan pada Tahun 2024	Jumlah data dan informasi Perisinan dan non pedalnen derbasis sistem Pelapunan Pedisinan berusaha terbitegrasi secara selektronik yang disah, dikaji dan dimanta atkan.	jum lah dasa dan Informasi perkinan dan non perkinan berbasis sistem pelayanan perkinan beruaha terintegrasi secara elektronik yang diolah dikeji dan dimenfasikan	Jamilah Siesem Informasi Peditiran Barbasis Ekebroolis yang Terimagnasi dengan Sistem Pelayanan Peditiran dan Mon Perlitiran	Persentase Peringketan Sistem Informasi Persenaman Model	Jumihh kegistan utaha dari pelaku utaha yang telah dianalisa dan werifikasi data, posil dan Informasi kegistan utaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan : serta dilakukan awalusi penilai bakapatuhan pelaksa maan pertainan berutaha	jumiah Pelaku usaha yang mengkuti bimbingan eteris/sosialitasi implomentasi Perilihan beresaha berbasis ricoto dan pengawasan perisinan berusaha berbasis itsiko	Jumiah Panyelasalan permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam mercalisasikan kegintan usahanya	jumlah keglatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	jumlah pelaku usaha yang medapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	jumlah kogisten usaha deri pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksnaan penanaman modal	Armiah Laporan Pengandakan Pelatraman Penanunan Modal	Persentase Nilai Penaneman Model
	p.	<u>н</u> .	190	92.25	30	250	15	15	15	16	<b>μ</b>	Ħ
	Dokumen	Dokumen	¥	Hilai	Keglatan Usaha	Pelaku Usaha	Kegiatan Usahe	Kegtatan Usaha	Pelaku Useha	Kegiatan Csahu	Lapones	×
		1	48000	100	,	,		22		0	Ĕ	100
		Dokumen	Jumlah Penanjung MPP	*				Kegiatan Useha	Petaku ∪saha	Registan Usaha	*	×
		¥08	150%	700%			,	22 kegiaten usaha	224 pelaku usaha		100%	700%
	·	331,000,000	000'080'116	331,000,000				4,480,000	200,697,400		205,171,400	205,177,400
		0						۵	0	•		
	Dokuman	0	¥001	100%	30 Kagistan Usaha	250 Peleku Usaha	10 Kegletan Useha				100%	100%
	,	a	200	100		,		0	9	0	150	100
		0	×	×	,		,	0	0	9	*	×
	1	1	1	1	1	í	1				and the second second	

#### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dihitung berdasarkan capaian target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah tertuang dalam Renstra DPMPTSP, dalam Peraturan WaliKota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata kerja DPMPTSP antara lain:

- melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Satu pintu.
- 3. Menyusun peta potensi investasi Kota.
- 4. Menyelenggarakan promosi penanaman modal.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026 memuat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh terdapat pada RKP yaitu "Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan fungsional" dengan sasaran "Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik". Adapun strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan Optimalisasi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah. Maka dengan mengacu kepada hal tersebut, dalam Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026 yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Banda Aceh untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu:

- 1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA
- 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 2.2.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

(Kondisi per Desember 2023)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	TARGET KINERJA SASJ TAHUN 2023	ARAN	REALISASI KINERIA SAS TAHUN 2023	ARAN	CAPAIAN TAHUN 2023
Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Penanaman Modal	90.74		93.73		103%
Pintu dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif Melalui Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi Beskala Nasional PMDN/PMA	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 575,276,278,192.00	Milyar	Rp 573,535,555,168.00	Milyar	99.70%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Rata-Rata P	ersentase Realisasi			•	101%

Capaian jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA sampai pada triwulan keempat mencapai Rp. 136.619.739.814 triliun dengan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 57.539.814 triliun dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp. 136.562.200.000 triliun, dengan jumlah 830 Investor. Capaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Banda Aceh hingga Tahun 2023 yang terkait: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada semester I tahun 2023 dengan nilai Indeks 93,67 atau berada pada katagori A (Sangat Baik) dan semester II tahun 2023 dengan nilai indeks 93.80 atau berada pada katagori A (Sangat Baik). Selain itu juga, penyelenggaraan perizinan DPMPTSP Kota Banda Aceh telah memperoleh penghargaan dari Kementerian PAN & RB yaitu Predikat A untuk unit penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima lingkup pemerintah daerah Tahun 2022. Terkait dengan capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2022 mendapat nilai B, Nilai ini tentunya masih jauh dari target yang ingin dicapai. Namun pada tahun 2023 capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mendapat nilai BB. Melalui capaian tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan DPMPTSP Kota Banda Aceh pada masa yang akan datang.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

ω	2	ш	(1)	N O
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Realisasi Nilai Investasi Berskala Nilai PMDN/PMA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(2)	indikator
				SPM/ Standar Nasional
and the second s			(4)	IKK
8	575.27 Milyar	90.74	(5)	Tahun (2023)
8	602.67 Milyar	90.75	(6)	Target Rei Tahun (2024)
œ	630.06 Milyar	90.76	(7)	Target Renstra SKPD Tahun Tahun (2024) (2025)
æ	657.45 Milyar	90.77	(8)	Tahun (2026)
tb	433.87 Milyar	92,29	(9)	Reali Tahun (2022)
,	575.27 Milyar	93.73	(10)	Realisasi Capaian un Tahun (2023)
00	630.06 Milyar	90.76	(11)	Proyeksl Tahun (2025)
8	657.45 Milyar	90.77	(12)	ksi Tahun (2026)
			(13)	Catatan Analisis

# 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Salah satu tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yaitu melakukan pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan. Dalam rangka peningkatan sistem pelayanan perizinan Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektornik melalui penerapan Aplikasi *Online Single Submission* (OSS). Penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan perizinan dengan mengurangi proses birokrasi sehingga mempermudah para pelaku usaha untuk mendapatkan izin berusaha di Indonesia.

Digitalisasi sistem pelayanan perizinan melalui penerapan OSS selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang pada akhirnya dapat mendongkrak daya saing Indonesia. Daya saing suatu daerah merupakan hal yang sangat penting bagi investor untuk menentukan keputusan berinvestasi. Investor cenderung akan memilih daerah yang lingkungan bisnis dengan kebijakan yang ramah, sehingga menjadikan investor menanam investasinya dengan risiko yang dapat dikelola dan terkontrol. Sehingga pada akhirnya dengan perbaikan sistem perizinan diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi khususnya di Kota Banda Aceh dan provinsi Aceh.

Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini dirasa masih belum cukup untuk mewujudkan realisasi penanaman modal sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah daerah terkait sistem OSS baik dalam regulasi maupun sistemnya. Adapun beberapa isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan antara lain:

 Pemerintah perlu segera menerbitkan kebijakan terkait dengan kelembagaan PTSP di daerah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dalam rangka debirokratisasi pelayanan perizinan. Hal ini karena adanya beberapa NSPK sebagai peraturan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 dalam mekanisme pelayanannya tidak mewajibkan prosesnya melalui DPMPTSP tetapi langsung melalui perangkat daerah teknis

- 2. Mendorong kejelasan, kepastian dan harmonisasi kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui sistem OSS, baik regulasi maupun sistemnya secara konsisten tidak selalu berubah-ubah;
- 3. Mendorong pemerintah dalam hal sinergitas antara Kementerian/Lembaga dengan daerah dalam mewujudkan kebijakan pelayanan perizinan baik berupa NSPK ataupun rencana penerbitan omnibuslaw yang sesuai dengan maksud dan tujuan diterbitkannya PP No 24 Tahun 2018 dengan melibatkan pemerintah daerah.
- 4. Meningkatkan optimalisasi dan sinkronisasi peran perencanaan dan pengembangan potensi penanaman modal dari BKPM terhadap daerah dalam bentuk program dekonsentrasi yang nyata sehingga potensi dan realisasi penanaman modal di daerah dapat dioptimalkan dengan baik.
- 5. Perlunya fasilitas pelaksanaan Alokasi dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani Perizinan dan Non Perizinan terlatih, Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Perizinan dan Non Perizinan.

# BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019 – 2024 yang merupakan tema pembangunan tahun 2019 – 2024, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi Misi Presiden tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019 – 2024, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2019 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Rencana kerja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh 2023 - 2026. Mengacu kepada Renstra ini, maka tujuan yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kota Banda Aceh selama lima tahun mendatang yaitu "Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu", serta "Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui Kebijakan Penanaman Modal" Sementara itu, sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh tahun 2023 – 2026 yaitu:

- Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal; dan
- 2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui Kebijakan Penanaman Modal.

Adapun sasaran strategi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dituangkan dalam dokumen Rancangan Kerja (Renja) Tahun 2023 – 2026.

Sasaran 1 : Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.

Maka Indikator sasaran DPMPTSP dalam mendukung rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu:

- 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
- 2. Pertumbuhan Ekonomi.

### 3.3. Program dan Kegiatan.

Program merupakan Kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terrhadap rumusan Program dan kegiatan dalam Renja DPMPTSP tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pencapaian Visi pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 tidak telepas dari memperkuat Tata Kelola pemerintahan yang baik, dengan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2016, namun perekonomian Kota Banda Aceh mengalami perlambatan dari 6,31 menjadi 3,39. Kemudian pada tahun 2018 mulai membaik atau meningkat 1,1 persen dibandingkan tahun 2017. Hal ini didukung dengan adanya geliat pertumbuhan kegiatan ekonomi pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mengalami perlambatan kembali tahun 2019 dan 2020 akibat dari pandemic Covid-19 yang menghambat berbagai kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh. Seluruh sektor mengalami perlambatan yang pada akhirnya menurunkan secara drastis pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Strategi peningkatan perekonomian Kota Banda Aceh salah satunya dengan Program Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal yang merupakan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

#### b) Pencapaian SDG's

Tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDG's) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan Internasional dimasa mendatang, dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dipromosikan sebagai tujuan Global untuk pembangunan yang berkelanjutan. SDG's menggantikan MDG's (Tujuan Pembangunan Milenium) yang tidak laju berlaku terhitung mulai akhir 2015. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga 2030.

Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dalam pencapaian SDG's yaitu :

- Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan dan kemudahan dalam mengurus perizinan berusaha yang terintegritas secara elektronik: Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan bagi para pelaku usaha melalui kegiatan kunjungan lapangan. Bimtek Implementasi pembinaan perizinan berusaha berbasis resiko dan Bimtek Implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko serta kegiatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.
- Terjadinya kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua., Ditendai dengan jumlah Investor PMDN/PMA tahun 2023 (kondisi TW IV) sebanyak 3.526 investor. Dengan nilai realisasi investasi sebanyak Rp. 573.535.555.168 triliun.
- 2. Uraian garis besar menengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh memiliki tupoksi didalam pencapaian kinerja di bidang Penanaman Modal dan perizinan, program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2025, yaitu :
  - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
  - 1.3. Kegiatan Administrasi Pegawaian Perangkat Daerah.
    - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya.

- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - 1.4.3. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
  - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
  - 2.1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanamanm Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
    - 2.1.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan.
  - 2.2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
    - 2.2.2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
- 3. Program Promosi Penanaman Modal.
  - 3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

- 3.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
- 4. Program Pelayanan Penanaman Modal.
  - 1.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
    - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.
    - 1.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - 3.4. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
    - 3.4.1. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
    - 3.4.2. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha
    - 3.4.3. Pengawasan Penanaman Modal.
- 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
  - 6.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
    - 6.1.1. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanana Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Kegiatan lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2025 banyak dilaksanakan di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Untuk kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan dibeberapa tempat di Kota Banda Aceh. Total Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalh 6 program, 13 kegiatan, dan 30 sub kegiatan, Dengan rencana total jumlah pagu indikatif 2025 mencapai Rp. 12.013.580.546.

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Derah tahun 2025

Kode	,							Rencana Ta	hun 2025			Perki	raan Maju Ren	ana Tahun 2026
				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Loicasi		et Capeian Gnerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dena	Catatan Penting	Target Capa	ian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		1}		(2)	(3)	(4)		(5)	(10)	(7)	(8)	(9	)	(10)
2 1/	•			BENEFIT .					27.000.000.000					17,000,000,000
2 1	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Deerah Kabupaten/Kota	Persentase permenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Kota Banda Acab, Balturrahman, Kampung Baro	100	%	10,453,509,586	PAD		100	%	10,453,509,586
2 18	3 01	2.01		Kegisten Perencanaan, Penganggaran, dan Evatuasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	Kota Banda Aceh, Balturrahman, Kampung Baro	100	*	7,396,800	PAD		100	%	7,396,800
1.8	3 01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	5	Dokumen	Rp 7,396,800	PAD		9	Dokumen	Rp 7,396,800
2 14	3 01	2.02		Kegistan Administrasi Keuangan Perangkat Deerah	Persentasa perrenuhan administrasi keuangan	Kota Banda Aceh, Beiturrahman, Kampung Baro	100	*	5,705,562,085	DAU-PAD		100	%	5,705,562,085
2 18	3 01	2.02	0001	Sub Keglatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlahorang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	32	Orang/ Bulan	4,888,302,085	DAU		32	Orang/Bulan	4,888,302,085
1,5	01	2.02	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Banda Aceh, Balturrahman, Kampung Baro	12	Dokumen	817,260,000	DAU-PAO		12	Dokumen	817,260,000
16	01	2.05	İ	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawalan Perangkat Deerah	Kota Banda Acah, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	56,200,000	PAD		100	*	56,200,000
18	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakalan dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	56	Paket	56,200,000	PAD		50	Paket	56,200,000
1.8	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Deerah	Parsentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	Kota Banda Acah, Balturrahman, Kampung Baro	100	*	408, 456, 305	PAD		100	*	408,456,305
18	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Beiturrahman, Kampung Baro	12	Paket	11,542,000	PAD		12	Paket	11,542,000
18	01	2.06	0004	Sub Keglatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	7	Paket	5,295,000	PAD		7	Paket	5,295,000
18		2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disedlakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	12	Paket	41,619,305	PAD		12	Paket	41,619,305
18	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Kota Sanda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	10	Laporan	350,000,000	PAD		10	Laporan	350,000,000

2 7	18	01	2,07		Kegleten Pengadaan Berang Milik Deersh Penunjang Urusan Pemerintah Deersh	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Benda Aceh, Balturahman, Kampung Bero	100	*	517,128,000	PAD		100	*	517,128,000
2 1	18	01	1.07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang disedlakan	Kota Banda Aceh, Belturrehmen, Kampung Baro	1	Unit	-	-	-	1	Unit	-
2 1	18	01	2.07	0006	Sub Keglatan Pengadaan Peralatan dan Masin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturmhman, Kampung Baro	50	Unit	517,128,000	PAD		50	Unit	517, 128,000
2 1	18	01	2.07	0010	Sub Kegistan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atsu Bangunan Lainnya yang disediakan	Kote Banda Aceh, Baiturrehmen, Kampung Baro	1	Unit	-	PAD		1	Unit	-
2 1	LS	01	2.08		Kagister Penyediser Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Deersh	Kota Sanda Acah, Saltumahman, Kempung Sano	100	*	1,648,736,061	PAD		100	*	1,648,736,061
2 1	18	01	2.08	0002	Sub Kagiatan Penyadiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Liatrik yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	12	Laporan	1,364,150,000	PAD		12	Laporan	1,364,150,000
				0004	Sub Keglatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kentor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Banda Acah, Baitumahman. Kampung Baro	12	Laporan	284,586,061	PAD		12	Laporan	284,586,061
2 1	LB (	01	2.09		Kegletan Pemeliharaan Berang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pementase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kote Sanda Acah, Balturahman, Kanyang Sana	100	*	2, 110, 030, 336	PAD		100	*	2,110,090,335
2 1				0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	7	Unit	59,136,000	PAD		7	Unit	59,136,000
2 1	8	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan den Mesin Lajanya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Banda Acah, Baiturrahman, Kampung Baro	59	Unit	169,294,335	PAD		59	Unit	169,294,335
2 1	8 (	01	2.09	0010	Sub Keglatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarane dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunen Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Benda Aceb. Sulturrehman, Kampung Bero	2	Unit	1,881,600,000	PAD		2	Unit	1,881,600,000
2 1	8 (	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Ildim Penanaman Modal	Kota Senda Aceh	100	*	775,235,000	PAD		100	×	775,235,000
2 1			2.01		Kegistan Penetapan Pemberian Fesilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumish Penetapan Pembarian Facilites/Insentif Dibidang Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	74	654,625,000	PAD		100	*	656,625,000
2 1	8	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Kota Bands Aceh	1	Dokumen	299, 305, 000	PAD		1	Dokumen	299,305,000
2 1	8 0	)2	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupoaten/Kota	Jumlah kesepaketan Kemitrean antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah.	Kots Banda Aceh	50	Dokumen	357,320,000	PAD		50	Dokumen	357,320,000
2 1	B (	)2 	2.02		Kegletan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupatan/Kota	Jumish Pembuatan Peta Potensi Penanamen Modal	Kots Sands Aceh	100	*	118,610,000	PAD		100	*	118,510,000
2 14	8 0	92	2.02	0001	Sub Keglatan Penyusunan Rencena Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumish Peraturan Daerah (Perda) Rencana umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kote Bende Aceh	1	Dokumen		PAD		1	Dokumen	-
2 12	8 0	)2	2.02	0003	Pemutahiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potansi Investasi Regional)	jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi Investasi	Kota Bende Aceh	1	Daerah	118,610,000	PAD		1	Daerah	118,610,000
2 11			2.02	0004	Sub Kegiatan Penyusunan Pata Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh	1	Dakumen	-	PAO		1	Dokumen	
:  24	8 0	E			Program Promosi Peneneman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	Kota Benda Aceh	100	%	271,530,000	PAD		100	96	271,530,000
	_ +_	+	2.0-		Kegletan Penyelenggaraan Promosi	Jumiah Laporan Penyalenggeraan Promosi	Kots Benda Aceh	1	Laporen	271,530,000	PAD		100	*	271,830,000
114			2.01		Penanaman Model yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penanaman Modal		ļ			<u> </u>	<b>+</b>			<del> </del>
1 18		)3	2.01		Penanaman Model yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Model Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil keglatan Promosi Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	271,530,000	PAD		1	Dokumen	271,530,000

2	18	04		<u> </u>	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	Kota Banda Aceh	100	%	80,685,960	PAD	100	%	80,685,960
2	1.8	04	2.01		Kegistan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupetan/Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Kota Benda Acah	2	Laporan	80,685,960	PAD	100	*	80,685,960
2	18 (	04	2.01	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Kota Banda Aceh	2500	Pelaku Usaha	22,685,960	PAD	2500	Pelaku Usaha	22,685,960
2	18 (	04	2.01	0007	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Pengaduan Layanan Konsultasi Perlzinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Kota Benda Aceh	500	pelaku usaha	•	PAD	500	pelaku usaha	-
2	18 (	Ď4	2.01	0008	Pernantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah keglatan usaha yang mendapat pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daeerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Kota Banda Aceh	80	Kegiatan Usaha	58,000,000	PAD	80	Keglatan Usaha	58,000,000
2	LB C	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Niiai Penanaman Modal	Kote Bends Aceh	100	%	370,000,000	DAK	100	*	370,000,000
2	18 (	D5	2.01		Kegistan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Deerah Kabupatan/Kota	Jumleh Laporen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Senda Aceh	100	*	370,000,000	DAK	100	%	370,000,000
2	18 (	05	2.01	0004	Sub Kegiatan Penyelesalan Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.	Jumlah Penyelesalan permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kota Banda Aceh	10	Kegiatan Usaha	10,040,000	DAK	10	Keglatan Usaha	10,040,000
2 1	18 (	05	2.01	0005	Sub Keglatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan berusaha berbasis risoko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Kots Benda Aceh	250	Pelaku Usaha		DAK	250	Pelaku Usaha	<u>.</u>
			2.01	0006	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan verifikasi data, profil dan Informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan ; serta dilakukan evalusi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kota Banda Aceh	30	Keglatan Usaha	359,960,000	DAK	30	Kegiatan Usaha	359,960,000
2 1	8 0	<b>)</b> 6			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	62,620,000	PAD	100	*	62,620,000
2 1	.8 0	)6 	2.01		Keglatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kota Banda Acah	100	%	62,620,000	PAD	100	*	62,620,000
2 1	.8 0	06	2.01	0002	Sub Keglatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanana Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah data dan informasi Perizinan dan non perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan	Kota Banda Aceh	1	Dakumen	62,620,000	PAD	1	Dokumen	62,620,000

# BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 -2026, Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Banda Aceh dan Hasil evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2023. Mengacu pada dokumen tersebut DPMPTSP Kota Banda Aceh telah merumuskan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan, beserta kerangka pendanaan indikatif.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yaitu "Mengoptimalkan Reformasi Bikrokrasi dan tata Kelola pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu", dengan sasaran Optimalnya Reformasi Bikrokrasi dan tata Kelola Pemerintahan pada penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan tujuan "Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal" dengan sasaran jangka menengah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.

#### 1. Program

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maka disusunlah program, kegiatan, dan sub kegiatan kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, VAlidasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun kegiatan unggulan/prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2025, antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- 2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 3) Program Promosi Penanaman Modal;

- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 5) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- 6) Program pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

#### 2. Kegiatan.

Sesuai dengan kebijakan program yang telah ditetapkan bersama, maka perlu ditetapkan bebrapa kegiatan untuk menunjang program – program yang telah ada. Untuk merealisasikan program – program diatas, ditetapkan kegiatan – kegiatn yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Pegawaian Perangkat Daerah.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 8) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- 9) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- 10) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 11) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 12) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 13) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 14) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

## 3. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut atau prnerjemahan dari aktivitis atau layanan kegiatan di dalam pelaksanaan kewenangan daerah dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan kegiatan – kegiatan diatas, ditetapkan sub kegiatan – sub kegiatan yanag dilaksanakan antara lain:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 4) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
- 10) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 11) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 12) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 13) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 14) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 15) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 16) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 17) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 18) Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- 19) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 20) Sub Kegiatan Pemutahiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
- 21) Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- 22) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 23) Sub Kegiatan Penyusunan strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

- 24) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- 25) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Pengaduan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 26) Sub Kegiatan Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko
- 27) Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
- 28) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
- 29) Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal
- 30) Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanana Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Tabel 4.1 Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran Tahun 2025

DPMPTSP	284,586,061	Laporan	12	Kole Banda Aceh, Balkurrahman, Xampung Baro	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Sub Kegistan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0004	2.08	to	16	N
OPMPTSP	1,364,150,000	Laporan	12	Kota Banda Aceh, Balturrahman, Kampung Baro	Jurnieh laporan Penyedisan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2002	2.08	Ş	18	N
DPMPTSP	1,848,736,081	*	100	Kels Sands Aceh, Balturehman, Kempung Baro	Persentase persenuhan Penyediaan Jasa Penuniang Urusan Persenintahan Deerah	Kegisten Penyediaan Jase Penunjang Urusan Pemerintah Deerah		2.08	β	Ľ	N
OPW#TSP		Unit	1	Kota danda Aceb. Balturrahmati. Kampung Baco	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Godung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Sub Kegistan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0100	2.07	5	5	~
DPMPTSP	517,128,000	Unit	50	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Bard	Jumlah unit Persistan dan Mesin talanya yang disadiakan	Sub Kagistan Pengadaan Persiatan dan Mesin Lainnya	9006	2.07	2	ä	~
OPMPTSP		Unit	1	Kote Benda Acah, Baiturrahmen, Kempung Baro	Jumlah unit kendaran dinas oprasional atau lapangan yang disediakan	Sub Kegistan Pengadean Kendaraan Olnas Oprasional atau Lapangan	0002	1.07	2	15	
OPMPTSP	\$17,128,000	¥	100	Kota Bende Acek, Belturrakmen, Kampung Bero	Persentase permenuhan kebutuhan Barang Milik Deerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keglatan Pangadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Deerah		2.07	ន្ត	¥	₩
DPMPTSP	350,000,000	Laporan	10	Kola Banda Acab, Balturrahman, Kampung Baro	Jumlah Japoren penyelenggaraan rapet koordinasi dan konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultesi SKPD	9009	2.06	2	ă	~
DPMPTSP	41,619,305	Deren	12	Kota Banda Aceh, Salturrahmen, Kempung Saro	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Sub Kegisten Penyediaan Bareng Cetakan dan Penggandaan	2005	2.06	2	18	N
Pagawai DPMP15P	5,295,000	Paker	7	Kota Sanda Aceh, Beiturrahmen. Kampung Sero	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Sub Keglatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	000	2.06	요	16	N
DPMPTSP	11,542,000	Paker	ı,	Kota Banda Acab, Balturrabman, Kampuna Bero	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penyerangan Bangunan Kantor	1000	20.06	2	£	
DPWPTSP	408,484,308	¥	100	Kota Banda Abah, Balturrahirtan, Kampung Baro	Persentase persenuhan kehutuhan penunjang administrasi umum	Kagistan Administrasi Umum Perangkat Daerah		208	β	E	
Pegawai DPMPTSP	56,200,000	Paket	56	Kota Banda Acah, Baiturahman, Kampung Baro	Jumilan paket Pakaian dinas beserte atribut kelangkapan	Sub Kegistan Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0002	2.05	10	ă	~
Pagawai DPMPTSP	34, 200,000	×	90.t	Keta Banda Apah, Balturrahmen, Kempung Bara	Persentase pemenuhan Administrat Kepegawaten Persengkat Deersh	Kagistan Administrasi Kapagawalan Perangkat Deersh		2.05	₽	=	N
Pegawai DPMPTSP	817,260,000	Dokumen	13	Kota Benda Aceh, Balturrahman. Kampung Baro	Jumlah dokumen hasii penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Sub Keglaten Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	00 20 20	2.02	5	is.	*
Pagawai DPMPTSP	4,998,302,083	Orang/ Bulan	3,2	Kola Banda Aceh, Bellumehmen, Kampuné Bero	Jumian orang yang menerimagaji dan tunjangan ASN	Sub Keglatan Penyadiaan Gaji dan Tunjangan ASN	1000	2.02	2	15	ю
Pagawai DPMPTSP	E,705,562,065	¥	100	Kote Benda Asek, Bakturninnen, Kompung Baro	Persentase pernanuhan administrasi kewangan	Kegistan Administrasi Keuangan Perangkat Deersh		2.02	β	ä	N
DPMPTSP	7,396,800	Doxumen	v	Kote Banda Aceh, Beiturrehmen, Kempung Baco	Jumilah dokumen perencanaan yang disusun	Sub Keglatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1000	2.01	2	ŭ	
DPMPTSP	7,386,800	¥	OOT	Koto Barde Aush, Bellumskman. Kompung Baro	Persentasa dokumen perencansen, pengenggaren den evaluasi OPD yang tersusun	Kagiatan Panancanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinarja Penangkat Daarah		2.01	2	ä	N
DPMPTSP	10,459,509,586	*	5	Keta Benda Acet, Balturaturan. Ken pung dans	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Deerah Kabupaten/Kota			ρ	18	N
										5	N
(B)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)			Ē		1
Kelompok Sateran	Pagu	Satuan	Volume	Lokusi	Indikator Kinerja	Program dan Kaglatan		•	Xode		
						F					

Kota Banda Aceh 80	
	Kata Benda Acen 500
Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan persinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha barbasis risiko terintegrasi secara elektronik Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan	Kore Banda Aren 2500
	Kata Benda Aceh
	Kota Banda Acah 100
	Kota Banda Acen
	Kate Bende Aceh
	Kets Bands Assh
	Keta Banda Aceh
	Rote Bends Acen
	KOTA BRADE ACET
	Kota Banda Aceh
	Kota Benda Acah 100
	Kota Banda Aceh 50
	Kota Banda Acen
	Kata Banda Acah 100
	Kata Benda Acah
Kota	Kote Bands Aceh, Balturrahman. Z
KO14 6	Kota Banda Acah, Baiturahman, 59
Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya kota b	
Rott	Rosp Banda Acab, Bahurehman, 100

2 18 06 2.01 Sub Kegiat dan Inform Pelayanan	2 18 06 2.01 Ke	2 18 06 Pro	2 18 05 2.01 Sul	18 05 2.01 0005 18 05 2.01 0006	18 05 2.01 0004 18 05 2.01 0005 18 05 2.01 0005 18 05 2.01 0006	18 05 2.01 0004 18 05 2.01 0004 18 05 2.01 0005 18 05 2.01 0005
an Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data asi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem 9 Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Keglatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Persentase ketersediaan data dan Informasi Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.	. Usaha.	Hambatan Ikan Kegiatan Jusaha.	Modal /Kota /Kota Hambatan ikan Kegiatan ikan Kegiatan
Jumlah data dan informasi Perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.	Persentase ketersediaan data dan informasi Penanaman Modal	Persentasa Peningkatan Sistem Informasi Penanuman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan ; serta dilakukan evalusi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi Implementasi Perizinan berusaha berbasis risoko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risoko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risoko dan pengawasan pelaku usaha yang telah dianalisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evalusi penlalakukan inspeksi lapangan pelaksanaan perizinan berusaha	Jumlah Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/osialisasi implementasi Perizinan berusaha berbasis risoko dan pengawasan perizinan berusaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan pelaksanaan perizinan berusaha	Persentasa Pengendalan Pelaksanan Penanaman Modai  Jumlah Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya  Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan kenis/sosialisasi Implementasi Perizinan berusaha berbasis risoko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risoko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko  Jumlah kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evalusi penlaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha
Kota Banda Aceh	Kota Benda Azah	Kota Banda Aceh	Y Kota Banda Aceh			
٠	100	100	8	35 25	36 25	30 250 10 <b>16</b>
Dokumen	*	ж	Kegiatan Usaha	Pelaku Usaha Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha Pelaku Usaha Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha Pelaku Usaha Kegiatan Usaha
62,620,000	62,620,000	62,620,000	359,960,000	359,960,000	359,960,000	370,000,000 10,040,000
O DPMPTSP	OPMPTSP	DPMPTSP	) Pelaku Usaha			

# BAB. V PENUTUP

Dokumen Rancangan Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda aceh. Rencana kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan Pembangunan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal untuk mendukung arah Pembangunan Daerah, selain itu juga dalam rangka menunjang keberhasilan stategis daerah Kota Banda Aceh. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan diantara semua pihak yang terkait, maka seluruh Bidang dan Sekretariat pada DPMPTSP Kota Banda Aceh, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025, secara sinergitas dan terintegrasi.

Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBK Tahun 2025, Rancangan Awal Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Guna menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang di lingkungan DPMPTSP Kota Banda Aceh wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas, Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Banda Aceh, 1 April 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Andri, S. &TP,. M,Si

Pembina / NIP. 19840323 200212 1 002